

## SUMBER BERITA

## KABUPATEN LEBONG **SELASA, 17 JULI 2019**

KLIPING MEDIA 2019

KATEGORI	BERITA	UNTUK	BPK
----------	--------	-------	-----

_	_			=	
	POSITIF	NETRA	AL X	BAHAN PEMERIKSAAN	PERHATIAN KHUSUS

## Realisasi DD 4 Desa Diperiksa BPKP

4 desa, yaitu Ladang Palembang, Nangai Tayau, Suka Bumi dan Lemaupit menjadi sampel pemeriksaan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu dalam merealisasikan Dana Desa (DD) tahun 2018

RAKYAT BENGKULU

RADAR BENGKULU

**BENGKULU EKSPRESS** 

LEBONG, BE - Sebanyak aan Masyarakat Desa dan Milik Desa (BUMDes)," jelas-Sosial (PMDS) Kabpaten nya, kemarin (16/07). Lebong, Reko Haryanto SSos MSi melalui Kabid PMD, 2018 dan 2019.

MEDIA INDONESIA

**KOMPAS** 

Pemeriksaan akan dilaksnakan, yaitu untuk hari Eko Budi Santoso SP Mng pertama dilakukan di Desa mengatakan, bahwa ada Ladang Palembang Keca-3 kegiatan yang diperiksa matan Lebong Utara dan pihak BPKP dalam pemer- Desa Nangai Tayau Kecaiksaan realisasi DD tahun matan Amen. Selanjutnya hari kedua (hari ini) akan "Pembangunan fisik, dilaksanakan di Desa Suka

Kecamatan Lebong Sakti.

"Hanya 4 desa dijadikan sampel dari total 93 desa yang ada di Kabupaten Lebong," sampainya.

Dilakukannya pemeriksaan terhadap 3 item yang berasal dari DD merupakan salah satu melihat salah satu upaya untuk melakukan evaluasi dalam melihat Kepala Dinas Pemberday- keuangan dan Badan Usaha Bumi dan Desa Lemaupit seberapa jauh penyerapan

lakukan desa.

"Sementara ini pihak BPKP hanya untuk melihat penyerapan terlebih wenang dari BPKP Provinsi dahulu," ucapnya. Untuk Bengkulu. tindak lanjut dari hasil pihak BPKP, dirinya belum bisa memastikan, apakah akan ada tindak lanjut lain- harap dari kegiatan pemer-

hasil evaluasi adalah we-

"Kita hanya menemani pipemeriksaan," sampainya.

Untuk itulah, dirinya bernya atau tidak. Hal terse- iksaan yang dilakukan BPKP

DD di lapangan yang di- but dikarenakan dalam Provinsi Bengkulu dalam menentukan keputusan melihat penyerapan DD untuk tindak lanjut dari yang diterima setiap desa, menunjukan hasil yang baik atau semuanya bisa dipertanggungjawabkan.

"Itu harapan dari kita, kareevaluasi yang dilakukan hak BPKP untuk melakukan na kita tidak menginginkan Pemdes bermain-main dengan dana yang diberikan pemerintah," harap Eko Budi Santoso.(614)